

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keberlanjutan menjadi salah satu kewajiban entitas terhadap dampak aktivitas operasional yang dilakukan, dari aspek ekonomi, aspek sosial, maupun aspek lingkungan. Laporan keberlanjutan merepresentasikan akuntabilitas perusahaan terhadap investor dan pemangku kepentingan untuk disampaikan bagaimana aktivitas bisnis dijalankan serta bagaimana dampak sosial dan lingkungan dikelola (Pratitarari dan Honggowati, 2025). Melalui laporan keberlanjutan, perusahaan menyampaikan bagaimana strategi bisnis dijalankan secara berkelanjutan serta bagaimana risiko sosial dan ekologi dikelola (Triyono *et al.* 2025).

Regulasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ditegaskan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam pasal 74. Namun dalam praktiknya, penyampaian informasi keberlanjutan dalam bentuk komitmen terhadap efek sosial dan lingkungan masih menunjukkan tingkat kelengkapan yang beragam dan belum sepenuhnya mencerminkan dampak aktual aktivitas perusahaan (Mutiha, 2023). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa regulasi belum sepenuhnya mampu mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan secara komprehensif, terukur, dan transparan, sehingga pengungkapan yang dihasilkan masih bervariasi antarperusahaan.

Pengungkapan laporan keberlanjutan semakin menguat seiring dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, menetapkan kewajiban bagi emiten guna menyampaikan serta mengungkapkan laporan keberlanjutan sebagai unsur dalam praktik keuangan berkelanjutan (Chulim *et al.* 2025). Implementasi laporan keberlanjutan turut diperkuat dengan Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 mewajibkan publikasi laporan keberlanjutan di situs resmi perusahaan. Meskipun kewajiban tersebut telah diberlakukan, regulasi ini belum mengatur secara rinci mengenai seberapa luas dan mendalam pengungkapan laporan keberlanjutan yang direpresentasikan oleh perusahaan (Irawan dan Kusumawati, 2025). Akibatnya, perusahaan memiliki keleluasaan dalam menentukan tingkat pengungkapan, sehingga kualitas laporan keberlanjutan antaremiten menjadi tidak seragam (Mutih, 2023).

Sektor energi dan sektor bahan baku (subsektor logam dan mineral) memiliki keterkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam dan sering kali menjadi sorotan publik akibat risiko pencemaran lingkungan dan konflik sosial yang ditimbulkan (Anggara *et al.* 2023). Hal ini menyebabkan pentingnya pengungkapan laporan keberlanjutan pada sektor energi dan sektor bahan baku (subsektor logam dan mineral) tidak lagi dipandang sebatas pemenuhan aspek legalitas hukum, melainkan bergeser sebagai media pertanggungjawaban moral perusahaan terhadap dampak sosiologis dan lingkungan (Pratitarari dan Honggowati, 2025). Selain itu, masih terdapat indikasi praktik *greenwashing*, yaitu

kondisi di mana perusahaan menyampaikan situasi ramah lingkungan, namun emiten cenderung kontradiktif dengan realitas. (Suhardjo *et al.* 2025)

Kebijakan pengungkapan laporan keberlanjutan turut dipengaruhi oleh dinamika kondisi finansial internal, terutama faktor profitabilitas. Indikator ini secara mendasar memproksikan daya saing dan kecakapan korporasi dalam mengonversi aktivitas bisnis menjadi keuntungan yang bernilai ekonomis (Irawan dan Kusumawati, 2025). Perusahaan yang mempunyai tingkatan profitabilitas tinggi cenderung telah memperoleh reputasi melalui kinerja keuangan yang baik, sehingga dorongan untuk menambah pengungkapan terkait isu keberlanjutan cenderung menunjukkan tren yang menurun (Dewi *et al.* 2025).

Fenomena tersebut didukung oleh Ulfa *et al.* (2025) membuktikan bahwa peningkatan profitabilitas justru menurunkan tingkat keterbukaan informasi dalam laporan keberlanjutan, karena suatu perusahaan yang mengalami laba lebih berfokus pada efisiensi dibandingkan dengan transparansi sosial. Namun, penelitian Irawan dan Kusumawati (2025) menegaskan bahwa kapasitas profitabilitas tidak dapat selamanya menjadi tolak ukur dalam menentukan luas pengungkapan laporan keberlanjutan karena entitas bisnis tetap dapat melakukan pengungkapan meskipun laba rendah. Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai dinamika manajemen dalam praktik pelaporan korporat menjadikan hubungan antara profitabilitas dan pengungkapan laporan keberlanjutan ini perlu diuji dan dikaji kembali.

Selain profitabilitas, *leverage* juga dapat menjelaskan keterkaitan antara rasio hutang dan pengungkapan laporan keberlanjutan. *Leverage* bertindak sebagai

indikator skala keterikatan struktur modal korporasi terhadap instrumen pembiayaan luar serta besarnya kewajiban kepada kreditur (Dewi *et al.* 2025). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung mengalami tekanan yang makin besar untuk meningkatkan transparansi informasi nonkeuangan, termasuk laporan keberlanjutan (Suroso, 2025). Pengungkapan ini berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas untuk meyakinkan pihak eksternal (kreditur) bahwa perusahaan mampu mengelola risiko jangka panjang dan menjamin kelangsungan usahanya (Irawan dan Kusumawati, 2025). Penerbitan laporan keberlanjutan menjadi salah satu kewajiban dalam pemenuhan akuntabilitas mengenai dimensi sosial dan lingkungan perusahaan.

Penelitian Irawan dan Kusumawati (2025) menjelaskan keterkaitan antara tingkatan *leverage* dengan keterbukaan pengungkapan laporan keberlanjutan karena entitas bisnis berupaya menjaga kepercayaan kreditur dan mengelola risiko usaha. Namun, penelitian Anggara *et al.* (2023) memberikan argumen bahwa *leverage* tidak selamanya memacu entitas dalam memperluas cakupan serta kedalaman untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan akibat pertimbangan biaya serta tekanan finansial. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan keberlanjutan pada laporan keberlanjutan masih bersifat inkonsisten.

Good corporate governance turut mempengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan, secara spesifik merujuk terhadap peran dewan komisaris independen dan komite audit. Komposisi dewan komisaris independen diharapkan mampu menggerakkan manajemen perusahaan dalam mendorong keterbukaan

pengungkapan keberlanjutan sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan (Pratitarari dan Honggowati, 2025). Eksistensi peran dewan komisaris berpotensi menghadirkan tekanan terhadap manajemen dalam mengungkap laporan keberlanjutan (Nurhakiki *et al.* 2025). Hal ini diperkuat oleh penelitian Rumaningsih dan Rusmanto (2024) merepresentasikan dampak pengawasan dewan komisaris independen atas pengungkapan laporan keberlanjutan. Lain halnya dengan Kusumawardani (2022) menunjukkan dewan komisaris independen tidak memberikan dampak terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Dengan adanya kesenjangan dalam penelitian terdahulu, komisaris independen menunjukkan hasil yang bervariasi terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Komite audit berfungsi sebagai fungsi kontrol di mana menjaga kredibilitas pelaporan keuangan maupun non keuangan salah satunya laporan keberlanjutan, Efektifitas pengawasan komite audit yang efektif dapat mengevaluasi manajemen dan mendorong penyusunan laporan keberlanjutan yang lebih kredibel (Dewi *et al.* 2025). Hadirnya komite audit dapat memastikan kontrol pengungkapan laporan keberlanjutan dapat mencerminkan praktik pengungkapan yang substansial (Chulim *et al.* 2025). Sebaliknya menurut Ulfa *et al.* (2025) serta Dewi *et al.* (2025), komite audit tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan laporan keberlanjutan karena dinilai kurang efektif dan lebih berfokus pada temuan audit. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa peran komite audit dalam mendorong keterbukaan informasi mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan masih belum konsisten.

Profitabilitas dan *leverage* mencerminkan kondisi keuangan yang menentukan kemampuan serta tekanan perusahaan dalam memenuhi ekspektasi

pemangku kepentingan (Dewi *et al.* 2025). Dengan memiliki rasio profitabilitas yang baik, entitas cenderung lebih memprioritaskan alokasi sumber dayanya untuk menjaga efisiensi operasional dan ekspansi bisnis dibandingkan dengan memperluas pengungkapan aktivitas keberlanjutan (Dewi *et al.* 2025). Sementara tingkat *leverage* menunjukkan besarnya tuntutan akuntabilitas dari kreditur sebagai bagian dari *stakeholder* perusahaan (Anggara *et al.* 2023).

Kondisi keuangan tersebut kemudian berinteraksi dengan tata kelola perusahaan, di mana komisaris independen, dan komite audit berperan untuk menentukan arah kebijakan dan pengungkapan perusahaan selaras dengan kepentingan pihak terkait (Rumaningsih dan Rusmanto, 2024). Dewan komisaris independen berfungsi untuk mengarahkan serta mengawasi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Sedangkan komite audit melalui fungsi supervisinya, bertindak sebagai penjamin atas tingkat keandalan dan validitas data yang dipublikasikan (Irawan dan Kusumawati, 2025). Dengan demikian, profitabilitas dan *leverage* tidak hanya memengaruhi pengungkapan laporan keberlanjutan secara langsung, tetapi juga membentuk konteks di mana mekanisme tata kelola perusahaan bekerja dalam mendorong pertanggungjawaban serta keterbukaan informasi melalui laporan keberlanjutan terhadap para pemangku kepentingan.

Teori *stakeholder* digunakan sebagai dasar guna mendefinisikan hubungan antara profitabilitas, *leverage*, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit serta pengungkapan laporan keberlanjutan (Irawan dan Kusumawati, 2025). Teori *stakeholder* memandang tekanan akuntabilitas entitas bukan saja

terhadap pemegang saham. Lebih jauh, perusahaan memiliki kewajiban terhadap seluruh pihak yang bersinggungan dengan operasionalnya, termasuk investor, penyedia kredit, tenaga kerja, komunitas sosial, hingga keberlanjutan ekosistem (Irawan dan Kusumawati, 2025). Dengan demikian, perusahaan dituntut untuk menyampaikan informasi yang relevan dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas, salah satunya melalui pengungkapan laporan keberlanjutan.

Sektor energi dan sektor bahan baku (subsektor logam dan mineral) mempunyai atensi penting karena sektor ini memiliki karakteristik tingkat eksploitasi sumber daya alam serta besarnya dampak lingkungan yang ditimbulkan dibandingkan sektor lainnya (Suhardjo *et al.* 2025). Meskipun regulasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, kendati demikian kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan, tingkat keterbukaan pengungkapan antar perusahaan mengindikasikan adanya celah perbedaan antar perusahaan (Mutihah, 2023). Pemaparan di atas mengarahkan pada suatu permasalahan penelitian, yakni sejauh mana determinan internal perusahaan terutama yang berkaitan dengan pencapaian finansial dan struktur tata kelola berperan dalam menentukan tingkat pengungkapan

Karakteristik sebagian studi terdahulu terletak pada penggunaan objek pengamatan yang mencakup berbagai sektor secara sekaligus. Penelitian terdahulu seperti Pratitarari dan Honggowati (2025) menggunakan sektor energi, transportasi, dan industri. Selain itu, penelitian yang dilakukan Suroso (2025) menggunakan berbagai sektor seperti sektor energi, kesehatan, dan keuangan. Perbedaan sektor

dan periode penelitian tersebut berpotensi menyebabkan inkonsistensi temuan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang secara khusus menguji variabel-variabel tersebut terhadap perusahaan sektor energi serta bahan baku periode 2022-2024.

Hasil penelitian ini diproyeksikan dapat menyajikan potret empiris mengenai berbagai macam faktor yang mengintervensi pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan berbasis sumber daya alam. Kontribusi teoritis dari penelitian ini diproyeksikan dapat memperkaya literatur terkait pengungkapan laporan keberlanjutan, khususnya pada sektor energi dan sektor bahan baku (subsektor logam dan mineral). Secara praktis, studi ini mampu menyampaikan landasan evaluasi bagi perusahaan untuk memacu peningkatan keterbukaan informasi pengungkapan laporan keberlanjutan. Temuan ini juga dapat mempermudah investor dalam mengukur pertanggungjawaban serta komitmen Perusahaan terhadap pengungkapan keberlanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu terhadap pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ditargetkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yaitu :

1. Apakah profitabilitas dapat berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor energi beserta sektor bahan baku (subsektor logam dan mineral) yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2024?

2. Apakah *leverage* dapat berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor energi beserta sektor bahan baku (subsektor logam dan mineral) yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2024?
3. Apakah dewan komisaris independen dapat berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor energi beserta sektor bahan baku (subsektor logam dan mineral) yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2024?
4. Apakah komite audit dapat berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor energi beserta sektor bahan baku (subsektor logam dan mineral) yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2024?

1.3 Tujuan dan kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Memahami pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor energi beserta sektor bahan baku (subsektor logam dan mineral) yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2024.
2. Memahami pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor energi beserta sektor bahan baku (subsektor logam dan mineral) yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2024.
3. Memahami pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan beserta perusahaan sektor energi dan sektor bahan baku

(subsektor logam dan mineral) yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2024.

4. Memahami pengaruh komite audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor energi dan sektor bahan baku (subsektor logam dan mineral) yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2024.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini berpartisipasi dalam literatur mengenai informasi laporan keberlanjutan dengan menguji profitabilitas, *leverage*, dewan komisaris independen, dan komite audit yang memengaruhi tingkat pengungkapan dalam perusahaan sektor energi dan sektor bahan baku (subsektor logam dan mineral) di Indonesia.
2. Penelitian ini dapat menjadi evaluasi serta dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan untuk perusahaan.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan penilaian investor dalam pertimbangan penetapan keputusan investasi berbasis ESG.
4. Penelitian dapat memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pengungkapan laporan keberlanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam beberapa bagian di mana diuraikan dalam setiap bab yang berisikan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dirancang sebagai awalan dari penelitian ini. Bab ini menguraikan dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian hingga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menjabarkan tentang penggunaan teori sebagai dasar penjelasan penelitian tentang permasalahan penelitian. Struktur pemaparan bab ini terdiri dari teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian, kerangka berpikir, serta rumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga menguraikan desain metode penelitian yang terdiri dari deskripsi masing-masing variabel, cara pengumpulan data, baik dalam menentukan populasi dan sampel, serta teknik untuk mengolah data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan hasil dari pengolahan data yang terdiri dari pengujian variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian, serta interpretasi pada bagian pembahasan.

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup dari rangkaian penelitian, bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya serta saran sebagai bahan pertimbangan bagi agenda riset di masa mendatang.